

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1. Pelaksanaan Program PHBM Di Wilayah Hutan Kayu Putih Kabupaten Ponorogo

6.1.1. Program PHBM di Hutan Kayu Putih Ponorogo

Pelaksanaan program PHBM berawal dari kebakaran hutan di kawasan hutan kayu putih di Desa Sidoharjo. Kebakaran hutan ini terjadi karena pada kawasan tersebut banyak terdapat alang-alang dan rumput yang mudah terbakar di musim kemarau yang kemudian membakar pohon kayu putih. Terjadinya kebakaran hutan tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan hutan. Agar masyarakat sadar akan manfaat hutan, Perhutani mengajak masyarakat bekerjasama dalam melestarikan hutan, salah satunya dengan imbal jasa pengelolaan lahan. Imbal jasa tersebut berupa petani mendapatkan lahan untuk dikelola tanpa dikenakan biaya sewa lahan dan pihak Perhutani terbantu dalam menjaga kelestarian hutan kayu putih terutama pada produksi daun kayu putih.

Sebelum dilaksanakan PHBM, maka harus dibentuk sebuah kelembagaan untuk mencapai keberhasilan, kegiatan pembentukan kelembagaan antara lain:

1. Identifikasi Kelembagaan dan Pihak yang Berkepentingan
 - a. Identifikasi kelembagaan didesa adalah kegiatan inventarisasi kelembagaan yang ada di dukuh/desa baik lembaga formal, non formal maupun informal yang dapat menjadi mitra kerja dalam kegiatan.
 - b. Identifikasi terhadap pihak yang berkepentingan merupakan kegiatan inventarisasi terhadap kelompok atau lembaga didesa dan kota dalam bentuk usaha kecil, koperasi dan perusahaan berbadan hukum yang dapat menjadi mitra usaha dalam kegiatan.
2. Pembentukan Anggota PHBM

Untuk mewujudkan keberhasilan sistem PHBM secara optimal maka diperlukan pembentukan keanggotaan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Identifikasi profil desa dan potensi desa hutan dengan metode pendekatan partisipatif.
- b. Sosialisasi kelompok masyarakat desa hutan
- c. Pemantapan anggota, penjelasan AD/ART.

- d. Pembentukan anggota melalui rembug desa. Anggota tersebut harus diakte notariskan.
- e. Mendorong Anggota untuk berbadan hukum koperasi.

Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Sukun ini mempunyai 13 Lembaga Masyarakat Desa Hutan(LMDH) yang sudah disyahkan dan sudah mempunyai akte notaris, dan 13 LMDH ini digabung menjadi satu dalam satu paguyuban yang bernama Paguyuban Setio Makmur. Pada setiap LMDH ini diketuai oleh seorang ketua kelompok LMDH, dan setiap satu bulan sekali pada tanggal 10 selalu diadakan pertemuan antar ketua LMDH yang tergabung dalam Paguyuban Setio Makmur.

Program PHBM yang sudah terlaksana mampu mengurangi terjadinya kebakaran hutan di kawasan sukun, hingga akhirnya kebakaran hutan di kawasan hutan kayu putih di Sukun tidak pernah terjadi lagi. Pihak perhutani yang awalnya kesulitan dalam mencari tenaga kerja dalam melakukan pembibitan tanaman kayu putih, pemeliharaan tanaman kayu putih, penanaman tanaman kayu putih serta pemungutan daun kayu putih pada akhirnya tidak mengalami hal itu lagi, karena dengan adanya program PHBM perhutani dengan mudah bisa menjadikan anggota LMDH sebagai tenaga kerja untuk melakukan budidaya kayu putih.

6.1.2. Kajian Perhutani dalam PHBM

Secara historis Perum Perhutani merupakan perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara, telah beberapa kali diubah dan diatur kembali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), kemudian diubah kembali dalam PP No 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara yang kemudian disebut Perum Perhutani. Perum Perhutani Diberikan tugas khusus oleh pemerintah untuk pengelolaan hutan negara di pulau Jawa. Artinya Perum Perhutani merupakan satu-satunya pemegang konsesi pengelolaan hutan di kawasan hutan produksi dan lindung di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Hak dan Kewajiban pihak yang bekerjasama dalam pelaksanaan program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM). Pihak perhutani mempunyai hak

dan kewajiban dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM), hak dan kewajiban tersebut antara lain:

a. Hak pihak perhutani

- 1) Membuat penilaian atas kemampuan pihak anggota dalam melaksanakan kegiatan.
- 2) Menentukan nilai produk, nilai kontribusi bagi hasil tanaman pokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Kewajiban pihak perhutani

- 1) Mengkaji dan mengesahkan rencana mikro yang diajukan oleh pihak anggota sebagai dasar pelaksanaan teknis kerja dilapangan.
- 2) Menyusun rencana operasional kegiatan sesuai dengan RPKH/rencana mikro.
- 3) Memberikan pembinaan teknis kepada anggota dalam pelaksanaan kegiatan yang dikerjasamakan.
- 4) Menanggung biaya dan kebutuhan sarana untuk pelaksanaan kegiatan Rencana Operasional.
- 5) Bersama-sama dengan pihak anggota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program PHBM.

Lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) yang melakukan kegiatan pengelolaan hutan bersama masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yaitu:

a. Hak LMDH

- 1) Menerima dan mengatur pembayaran pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- 2) Mendapatkan bagi hasil non kayu berupa daun kayu putih sebesar Rp 5,-/Kg yang dihasilkan dari volume daun kayu putih dalam kawasan hutan yang dikerjasamakan.
- 3) Memanfaatkan lahan hutan dibawah tegakan dengan tanaman tumpangsari (tanaman pangan dan hortikultura) yang hasilnya 100 % menjadi hak masyarakat pengelola hutan (anggota LMDH).
- 4) Mendapatkan pembinaan dan bimbingan teknis dari pihak perhutani dan pihak lain yang berkepentingan.

b. Kewajiban LMDH

- 1) Membuat dan mengajukan rencana mikro kepada pihak perhutani.

- 2) Mengupayakan tenaga kerja dalam pelaksanaan kegiatan.
- 3) Menjaga keamanan sumberdaya hutan diwilayah hutan yang dikerjasamakan dan wilayah lain disekitarnya.
- 4) Membuat laporan kemajuan pekerjaan setiap periode waktu yang ditentukan.
- 5) Bersama-sama dengan pihak perhutani melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program PHBM.

6.1.3. Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Pada Program PHBM

Pengelola sumberdaya Hutan adalah kegiatan yang meliputi penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya hutan, pemanfaatan sumberdaya hutan dan kawasan hutan, serta perlindungan sumberdaya hutan dan konservasi alam. Hutan kayu putih di Kabupaten Ponorogo memiliki luas lahan kurang lebih seluas 3700 Ha dengan semua tanaman adalah tanaman kayu putih.

Masyarakat desa hutan yang mengelola sumberdaya hutan berkewajiban untuk menjaga keamanan hutan kayu putih agar terhindar dari kerusakan hutan seperti kebakaran. Masyarakat yang lalai tidak melakukan pengamanan hutan kayu putih yang bisa mengakibatkan hutan kayu putih dilahan yang dikelolanya menjadi terbakar akan dikeluarkan dari anggota PHBM. Masyarakat yang telah dikeluarkan dari PHBM tersebut tidak boleh mendaftar lagi menjadi anggota PHBM, karena itu merupakan hukuman bagi masyarakat yang lalai dalam menjaga keamanan hutan, selain itu kejadian tersebut juga merupakan peringatan bagi masyarakat anggota PHBM yang lain agar bertanggung jawab penuh dalam menjaga keamanan hutan agar terhindar dari kebakaran.

Pelaksanaan sumberdaya hutan bersama masyarakat dilaksanakan dengan jiwa bersama, berdaya dan berbagi yang meliputi pemanfaatan lahan atau ruang, pemanfaatan waktu pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung serta kesadaran akan tanggung jawab sosial (*Social Responcibility*). Pelaksanaan masyarakat dalam Program PHBM meliputi :

1. Pemanfaatan Ruang

Petani yang memiliki hak atas pemanfaatan ruang atau lahan berkewajiban untuk mengelola lahan, merawat dan menjaga tanaman kayu putih. Dalam

pengelolaan lahan dengan tumpang sari kayu putih, petani menumpangsarikan dengan tanaman palawija. Pengelolaan lahan di hutan kayu putih petani dapat memanfaatkan lorong kosong yang berukuran 3 x 3 meter untuk menanam tanaman palawija yang akan dibudidayakan. Gambar pemanfaatan ruang dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.



Gambar 2 : Pemanfaatan Ruang
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2014

Sistem penerapan pola tanam tumpang sari ini berada dibawah pengawasan KPH Madiun yang memberikan wewenang kepada BKPH Sukun untuk melaksanakan kegiatan PHBM dengan bekerjasama bersama masyarakat desa sekitar hutan untuk membantu mengelola tanaman kayu putih serta memberikan izin kepada masyarakat untuk menanam komoditas pertanian dibawah tegakan tanaman kayu putih.

Seluruh hutan kayu putih di kawasan Sukun tidak semuanya ditanami tanaman kayu putih dengan sistem tumpang sari. Penerapan sistem tanam tumpang sari pada tanaman kayu putih hanya dilaksanakan pada daerah yang kondisi tanah dan topografinya baik dan landai. Kondisi seperti itu sudah dipertimbangkan oleh Perhutani supaya tidak mempersulit petani penggarap lahan. Pelaksanaan tumpangsari perlu dilengkapi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku diperum perhutani.
2. Perjanjian kontrak perlu diperbaharui setiap tahun dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat perjanjian ditanda tangani.

3. Dalam melaksanakan tumpang sari dianjurkan diadakan pemupukan yang diadakan petani PHBM. Pengelolaan hutan dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 3 : Cara tanam
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2014

Pelaksanaan kegiatan PHBM tidak bisa berjalan dengan lancar karena munculnya berbagai kendala yang ditimbulkan oleh pesanggem atau anggota LMDH antara lain:

1. Lemahnya pengetahuan pesanggem atau anggota LMDH tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan PHBM membuat para pesanggem atau anggota LMDH banyak yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Perhutani.
2. Permasalahan lain yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan PHBM di BKPH Sukun adalah kurang aktifnya ketua LMDH untuk mengaktifkan anggotanya membuat pelaksanaan kegiatan PHBM menjadi tidak aktif sebagai akibat rendahnya SDM ketua LMDH.
3. Permasalahan alih fungsi lahan hutan kayu putih menjadi gubuk atau rumah kecil sebagai tempat peristirahatan pesanggem atau anggota LMDH yang bekerja sebagai tenaga kerja dalam proses budidaya tanaman kayu putih sebagai akibat dari kurang patuhnya tenaga kerja yang tempat tinggalnya jauh dari hutan kayu putih terhadap peraturan yang telah dibuat oleh pihak perhutani untuk tidak menguasai lahan milik perhutani.

Selain menanam tanaman yang dibudidayakan sebagai usahatannya petani PHBM juga bertanggungjawab atas tanaman utamanya yaitu kayu putih. Para

anggota petani berkewajiban untuk melaporkan jika ada tanaman kayu putih yang mati atau rusak di lahan pertaniannya kepada ketua kelompok, kemudian ketua kelompok melaporkan ke mandor pelaksana lapang dan yang terakhir dilaporkan kepada KRPH (Ketua Resort Pemangku Hutan). Setelah itu petani PHBM mendapatkan bibit pengganti kayu putih dan segera untuk ditanam di lahan untuk di ganti dengan tanaman kayu putih yang baru.

2. Pemanfaatan Hasil

Setelah melakukan budidaya di lahan hutan kayu putih, petani PHBM dapat memanen hasil usahatannya. Kegiatan panen rata-rata dilakukan oleh anggota keluarga petani PHBM dan anggota luar keluarga dengan hari orang kerja. Dari hasil usahatannya Perhutani tidak memungut upah atau petani harus memberikan sebagian hasil panen, petani tidak dituntut untuk memberikan itu kepada Perhutani. Sebaliknya dari hasil panennya petani juga mendapatkan hasil dari kayu putih yaitu dengan memanen tiap 1 Kg daun kayu putih dihargai dengan Rp 95.

Pungut daun di hutan kayu putih dapat diikuti oleh masyarakat yang tidak mengikuti program PHBM. Tarif upah pungut daun diupahi sama dengan petani PHBM sebesar Rp 95 tiap Kg daun yang dipungut. Jadi tenaga pungut daun kayu putih bebas dari masyarakat luar daerah, bahkan tenaga pungut ada yang berasal dari luar kota Ponorogo, misalnya saja dari Pacitan, Trenggalek dan Tulung Agung. Para petani dari luar Kabupaten ini bekerja untuk menambah penghasilan mereka dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Petani yang berasal dari luar Kabupaten ini memiliki rumah singgah yang berada di lahan kayu putih dengan mendirikan rumah di dalam hutan. Biasanya petani tersebut juga memiliki pekerjaan merangkap yang diberikan oleh pihak Perhutani dengan bekerja sewaktu-waktu menjadi pemadam kebakaran hutan, jika terjadi kebakaran. Imbal jasa yang diterima oleh petani dari luar daerah tersebut telah diberikan rumah tinggal gratis bersama dengan keluarga mereka masing-masing.

6.1.4. Fungsi Hutan Kayu Putih Di Kawasan Sukun Ponorogo

Hutan kayu putih memiliki nilai fungsi yang berupa fungsi produksi/ekonomis, fungsi ekologis dan fungsi sosial budaya. Berikut ini adalah penjelasan dari nilai fungsi hutan kayu putih :

1. Fungsi produksi atau ekonomis hutan kayu putih meliputi keseluruhan hasil hutan yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kehidupan manusia dalam melakukan berbagai tindakan ekonomi seperti hasil hutan untuk bahan baku industri minyak kayu putih, kayu bakar yang dipergunakan masyarakat desa sekitar hutan untuk memasak serta hasil hutan yang berupa air bersih untuk dijual kemasyarakat desa sekitar hutan kayu putih yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti untuk mandi, untuk minum, serta untuk memasak.
2. Fungsi ekologis hutan kayu putih berupa berbagai bentuk jasa lingkungan hutan yang diperlukan dalam memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan seperti mengendalikan erosi, memelihara kesuburan tanah, melestarikan habitat flora dan fauna serta mengendalikan penyakit tanaman pertanian yang ada disekitar hutan kayu putih Sukun.
3. Fungsi sosial budaya hutan kayu putih dapat berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh hutan yang dapat memenuhi kepentingan umum, terutama masyarakat di sekitar hutan untuk berbagai kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, seperti lapangan pekerjaan dalam proses pengelolaan hutan kayu putih mulai dari pembuatan persemaian tanaman kayu putih, penanaman tanaman kayu putih sampai dengan pemungutan daun kayu putih, lahan untuk bercocok tanam atau lahan hutan kayu putih yang bisa ditanami dengan sistem tumpangsari oleh anggota LMDH, persediaan kayu bakar untuk masyarakat desa sekitar hutan kayu putih Sukun, pendidikan, penelitian, budaya dan keagamaan.

6.1.5. Permasalahan Program PHBM di Hutan Kayu Putih Ponorogo

Berdasarkan keadaan di lapang, permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan dari dampak program PHBM yaitu alih fungsi lahan hutan kayu putih

menjadi gubuk atau rumah kecil sebagai tempat peristirahatan pesanggem yang mendapatkan hak atas kelola lahan yang diberikan oleh Perhutani. Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya produksi daun kayu putih karena lahan yang seharusnya ditanami kayu putih harus dialih fungsikan sebagai tempat tinggal atau gubuk. Permasalahan lain yang terjadi di hutan kayu putih yaitu petani masih kurang optimal dalam melaksanakan budidaya usahatani di lahan hutan kayu putih yang tidak sesuai dengan bimbingan teknis dari surat keputusan yang diberikan oleh pihak Unit KBM (Kesatuan Bisnis Mandiri) Surabaya. Hal tersebut terjadi karena kurangnya tenaga di lapang dalam mengawasinya. BKPH Sukun hanya memiliki 4 mandor hutan dalam mengawasi pengelolaan petani di lahan hutan, sehingga dengan tenaga kerja sekian orang tersebut tidak efisien dalam memonitoring jalannya pelaksanaan program PHBM sesuai dengan yang diharapkan ke depannya.

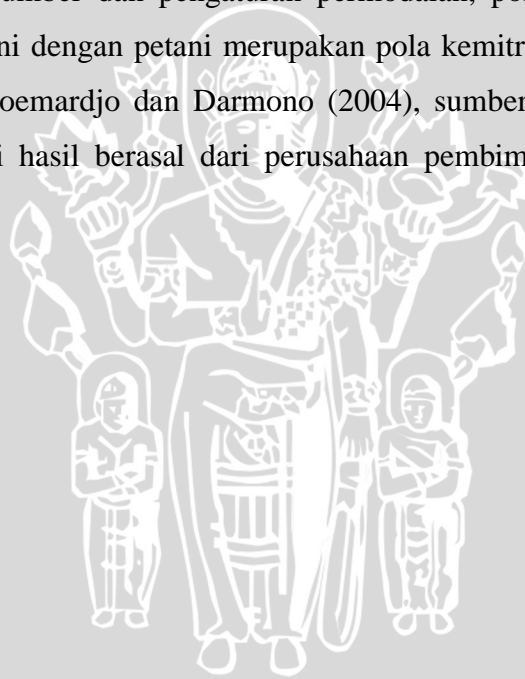
Kegiatan pembinaan atau pertemuan antar kelompok penggarap lahan kayu putih dilaksanakan setiap satu bulan sekali tepatnya setiap tanggal 26. Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk bertukar pikiran (*sharing*) permasalahan petani dalam pengelolaan lahan dan memberikan masukan-masukan apa kendala petani dalam berusahatani. Tetapi dalam kenyataannya kegiatan ini tidak dihadiri oleh semua petani yang menjadi penggarap lahan, hal ini menyebabkan informasi yang diberikan kepada petani tidak dapat diterima secara menyeluruh dalam setiap pertemuan. Berikut adalah gambar pertemuan petani dengan anggota kelompok PHBM.

Permasalahan lain yang muncul selama pelaksanaan program PHBM di hutan kayu putih adalah aspek sumberdaya manusia. Pada awal perjanjian, petani diberikan kewajiban memelihara dan memungut daun. Setelah tanaman utama panen, petani penggarap memanen hasil usahatannya tanpa dipungut hasil usahatani oleh pihak Perhutani. Namun pada pelaksanaannya setelah melakukan kegiatan panen dari komoditas yang dibudidayakan, petani tidak memungut daun kayu putih pada saat tiba masa pungut daun. Hal tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak Perhutani terhadap proses penyulingan daun kayu putih.

Pada pelaksanaan program PHBM di hutan kayu putih Ponorogo, perhutani dengan petani menyebut pola kemitraan ini dengan sistem hak atas

kelola lahan. Dalam sistem hak atas kelola lahan perhutani memberikan hak kepada petani untuk merawat dan menjaga tanaman kayu putih. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah RI No. 44 tahun 1997 tentang kemitraan, disebutkan bahwa pola kemitraan inti plasma merupakan hubungan kemitraan antara usaha besar atau menengah sebagai inti dengan usaha kecil sebagai plasmanya, dimana perusahaan inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam penyediaan dan penyiapan lahan; penyediaan sarana produksi; pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi; perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan; pembiayaan; serta pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

Ditinjau dari sumber dan pengaturan permodalan, pola kemitraan yang terjalin antara Perhutani dengan petani merupakan pola kemitraan dengan sistem bagi hasil. Menurut Soemardjo dan Darmono (2004), sumber permodalan dan kerjasama sistem bagi hasil berasal dari perusahaan pembimbing yang berupa sarana produksi.



6.2. Analisis Biaya Usahatani Komoditas-Komoditas yang Dibudidayakan Oleh Masyarakat Sekitar Hutan Kayu Putih Di Kabupaten Ponorogo

Analisis usahatani berfungsi untuk mengetahui tingkat pendapatan yang diperoleh petani dari kegiatan usahatani jagung, kedelai, kacang hijau, dan ketela yang diusahakan oleh petani PHBM dan petani non PHBM di daerah penelitian. Biaya usahatani adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh petani selama satu kali produksi komoditas-komoditas yang diusahakan petani di daerah penelitian. Biaya terbagi menjadi dua yaitu biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya tidak tetap (*variable cost*). Dalam penelitian ini, biaya yang dianalisis adalah biaya produksi komoditas-komoditas yang diusahakan pada tahun 2013-2014.

6.2.1. Biaya Tetap

Biaya tetap merupakan biaya yang jumlahnya relatif tetap dan secara tidak langsung mempengaruhi produksi. Biaya tetap dalam usahatani komoditas-komoditas yang diusahakan di daerah penelitian meliputi sewa lahan, pajak lahan, biaya penyusutan, irigasi dan sewa traktor. Rata-rata biaya tetap yang dikeluarkan usahatani antara petani PHBM dan petani non PHBM yang telah diusahakan di daerah penelitian bisa dilihat pada Tabel 9 dan rincian perhitungan biaya tetap dari komoditas-komoditas yang dibudidayakan petani PHBM dapat dilihat pada lampiran 3 sampai dengan lampiran 6.

Tabel 9. Rata-rata Biaya Tetap Usahatani komoditas-komoditas yang diusahakan oleh petani PHBM per 1 ha dalam Satu Tahun di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.

Komponen Biaya	Nilai (Rp)			
	Jagung	Kedelai	Kacang hijau	Ketela
Sewa Lahan	0	0	0	0
Pajak Lahan	0	0	0	0
Penyusutan Alat	22.681,32	19.892,31	6.971,21	17.979,12
Irigasi	0	0	0	0
Sewa Traktor	0	0	0	0
Total	22.681,32	19.892,31	6.971,21	17.979,12

Sumber : Data Primer Diolah, (2014)

Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa rata-rata biaya tetap usahatani yang digunakan oleh petani PHBM tertinggi pada usahatani komoditas jagung yaitu biaya penyusutan alat sebesar Rp. 22.681,32. Untuk biaya tetap usahatani komoditas yang diusahakan petani PHBM hanya biaya penyusutan alat

dikarenakan pada usahatani PHBM tidak dikenakan sewa lahan, pajak lahan, irigasi dan sewa traktor.

1. Biaya Penyusutan

Biaya penyusutan adalah biaya yang secara tidak langsung dikeluarkan oleh petani sebagai akibat penyusutan nilai dari peralatan yang digunakan dalam satu kali produksi komoditas-komoditas yang diusahakan petani di Desa Sidoharjo. Biaya penyusutan meliputi cangkul, sabit, traktor dan sprayer. Perhitungan peralatan ini didasari oleh metode garis lurus, dimana metode ini mengasumsikan bahwa alat-alat pertanian yang digunakan dalam usahatani menyusut dalam nilai yang sama setiap tahun.

2. Sewa Lahan

sewa lahan adalah nilai yang harus dikeluarkan untuk membayar lahan yang digunakan untuk berusahatani selama satu tahun. Dalam hal ini sewa lahan tidak dihitung karena lahan yang digunakan adalah milik Perhutani yang diperbolehkan digunakan untuk berusahatani di lahan kayu puth. petani tidak perlu membayar atas penggunaan lahan hutan kayu putih tersebut.

6.2.2. Biaya Tidak Tetap (*Variabel Cost*)

Dalam analisis usahatani, selain biaya tetap juga terdapat biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap (*variabel*) adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh petani yang besar-kecilnya berpengaruh pada produksi. Biaya tidak tetap dalam penelitian ini meliputi biaya benih, biaya pupuk urea, biaya pupuk phonska, biaya pupuk SP36, biaya pupuk kandang, pupuk organik, biaya pestisida, biaya tenaga kerja dan biaya lain. Rata-rata biaya *variabel* yang dikeluarkan oleh petani dapat dilihat pada Tabel 10 dan perhitungan biaya tetap dari komoditas yang dibudidayakan petani PHBM dapat dilihat pada lampiran 7 sampai dengan lampiran 10.

Tabel 10. Rata-rata Biaya Tidak Tetap Usahatani petani PHBM per 1 Ha.

Komponen Biaya	Nilai (Rp)			
	Jagung	Kedelai	Kacang hijau	Ketela
Benih	307.692,31	270.042,25	100.979,19	330.447,36
Pupuk Kimia	1.253.365,97	1.203.335,37	288.861,69	410.648,71
Pupuk Organik	78.870,87	262.086,90	73.439,41	0
Pestisida	72.215,42	73.133,41	36.719,71	621,00
Tenaga Kerja	2.605.569,16	1.422.582,62	659.424,72	1.186.964,50
Total	4.010.021,42	3.558.923,08	1.058.445,53	1.928.672,57

Sumber : Data Primer Diolah, (2014)

Berdasarkan Tabel 10, rata-rata biaya tidak tetap usahatani petani PHBM tertinggi pada musim tanam jagung sebesar Rp. 4.010.021,42 yang disebabkan oleh tingginya penggunaan variabel biaya tenaga kerja dan faktor yang lain yang mempengaruhi tingginya biaya variabel pada musim tanam jagung masih dalam pembukaan lahan baru atau awal tanam musim pertama. Perbedaan nilai dapat dilihat dari semua komponen biaya tidak tetap. Biaya paling tinggi yang harus dikeluarkan oleh petani dialokasikan kepada tenaga kerja musim tanam jagung. Biaya tenaga kerja merupakan biaya yang paling tinggi di antara biaya-biaya lain karena upah tenaga kerja yang tergolong tinggi sebesar Rp.40.000,00 per hari.

Untuk rata-rata biaya tidak tetap usahatani komoditas-komoditas yang dibudidayakan antara petani PHBM di daerah penelitian bisa dilihat pada tabel 10 berikut.

1. Biaya Benih

Benih yang banyak digunakan oleh petani di daerah penelitian biasanya diperoleh dari KUD, toko pertanian dan petani lain. Untuk satu hektar lahan pada lahan kayu putih untuk tanaman jagung dibutuhkan 18 Kg benih, dengan harga sebesar Rp. 60.000,00/Kg, untuk satu hektar kedelai dibutuhkan 32 Kg dengan harga sebesar Rp. 12.500,00/Kg, satu hektar kacang hijau dibutuhkan 20 Kg dengan harga sebesar Rp. 15.000,00/Kg, serta untuk satu hektar ketela dibutuhkan 1000 batang, dengan harga sebesar Rp. 225.000,00 tiap 250 batang.

2. Biaya Pupuk

Pupuk yang digunakan oleh petani di daerah penelitian antara lain pupuk kimia yang terdiri dari Urea, Phonska, SP36 dan pupuk organik. Rata-rata biaya pada komoditas-komoditas yang dibudidayakan per hektar yang harus dikeluarkan oleh petani PHBM untuk biaya pupuk adalah pada usahatani komoditas jagung sebesar Rp. 1.253.365,97. Jumlah komoditas yang ditanam selama 1 tahun lahan hutan kayu putih rata-rata dapat menanam sebanyak 4 komoditas.

3. Biaya Pestisida

Pestisida yang biasa digunakan oleh petani di daerah penelitian adalah Roundup, Lokson dan Matador. Pestisida ini diaplikasikan pada daun untuk hama ulat dan membasmi gulma. Penggunaan pestisida pada saat intensitas serangan hama mencapai ambang batas. Jika intensitas serangan hama rendah maka petani

hanya menggunakan cara manual untuk pengendalian hama. Rata-rata biaya yang harus dikeluarkan oleh petani per hektar di daerah penelitian di lahan kayu putih sebesar Rp. 72.215,42 untuk komoditas jagung.

4. Biaya Tenaga Kerja

Biaya tenaga kerja merupakan biaya yang paling tinggi dibandingkan biaya-biaya tidak tetap lainnya. Upah tenaga kerja di daerah penelitian sebesar Rp.40.000,00 per hari dan masih disediakan makanan. Tenaga kerja yang digunakan oleh petani berasal dari luar keluarga dan dalam keluarga. Biasanya petani menggunakan tenaga kerja pada saat pengolahan lahan, penanaman, dan panen. Untuk kegiatan perawatan seperti penyiraman, penyiangan, pemupukan dan penyemprotan pestisida dilakukan sendiri oleh petani. Namun, beberapa petani responden menggunakan tenaga kerja pada semua kegiatan usahatani komoditas-komoditas yang dibudidayakan mulai dari pengolahan lahan sampai panen. Rata-rata biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh petani per hektar di daerah penelitian lahan kayu putih jagung sebesar Rp. 2.605.569,16 merupakan biaya tenaga kerja dengan biaya tertinggi.

6.2.3. Biaya Total

Biaya total adalah keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan oleh petani selama kegiatan usahatani berlangsung. Biaya total bisa diketahui dengan menambahkan biaya tetap dengan biaya tidak tetap (variabel). Rata-rata biaya total petani PHBM di daerah penelitian dapat dilihat pada Tabel 11 berikut.

Tabel 11. Rata-rata Biaya Total Usahatani Komoditas-Komoditas yang Diusahakan Pada Petani PHBM per 1 ha dalam Satu Tahun di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.

Uraian	Nilai (Rp)			
	Jagung	Kedelai	Kacang hijau	Ketela
Biaya Tetap	22.681,32	19.892,31	6.971,21	17.979,12
Biaya Variabel	4.010.021,42	3.558.923,08	1.058.445,53	1.928.672,57
Biaya Total	4.054.912,74	3.578.815,39	1.071.278,90	1.946.651,67

Sumber : Data Primer Diolah, (2014)

Berdasarkan Tabel 11, dapat diketahui bahwa dari ke empat komoditas yang ditanam oleh petani PHBM, biaya total paling besar yaitu pada komoditas jagung sebesar Rp. 4.054.912,74, hal ini dikarenakan naiknya harga input pupuk dan biaya tenaga kerja. Sedangkan biaya total paling rendah yaitu pada komoditas

kacang hijau, hal ini disebabkan pada komoditas kacang hijau para petani lebih sedikit dalam menggunakan input produksi khususnya pada pupuk, pestisida dan tenaga kerja apabila dibandingkan dengan komoditas jagung, selain itu komoditas kacang hijau juga difungsikan oleh petani sebagai penambah unsur N dalam tanah, sehingga tujuan penanaman kacang hijau oleh petani bermanfaat untuk tanaman berikutnya.

6.3. Analisis Produksi Usahatani Komoditas-Komoditas Yang Dibudidayakan Oleh Masyarakat Sekitar Hutan Kayu Putih Di Kabupaten Ponorogo

Analisis usahatani berfungsi untuk mengetahui tingkat pendapatan yang diperoleh petani dalam kegiatan usahatani komoditas-komoditas yang ditanam di daerah penelitian yaitu di Desa Sidoharjo dimana mayoritas desa ini berada di kawasan hutan kayu putih.

Biaya usahatani komoditas-komoditas yang ditanam adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh petani selama satu kali musim tanam komoditas yang ditanam di daerah penelitian. Biaya terbagi menjadi dua yaitu biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya tidak tetap (*variable cost*). Dalam penelitian ini biaya yang dianalisis adalah biaya usahatani dalam satu tahun 2013-2014.

Tabel 12. Rata-Rata Produksi komoditas-Komoditas yang Diusahakan Petani PHBM per 1 ha Dalam Satu Tahun di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.

Jenis Komoditas / Musim	Produksi (Kw)
Jagung	41,66
Kedelai	14
Kacang Hijau	3,32
Ketela	46,15

Sumber : Data Primer Diolah, (2014)

Berdasarkan Tabel 12, dapat diketahui bahwa dari ke empat komoditas-komoditas yang ditanam oleh petani, rata-rata produksi paling tinggi yaitu pada komoditas jagung yang menghasilkan produksi 41,66 Kw/Ha, hal ini disebabkan karena komoditas jagung merupakan komoditas yang paling diunggulkan di kawasan hutan kayu putih. Sedangkan pada komoditas kacang hijau menghasilkan produksi paling rendah dibandingkan dengan ke tiga komoditas yang lain, hal ini terjadi dikarenakan komoditas kacang hijau tidak menjadi komoditas unggulan yang berada di hutan kayu putih, penanaman kacang hijau lebih difungsikan

sebagai penambah unsur N dalam tanah yang akhirnya akan menambah tingkat kesuburan dalam tanah.

6.4. Analisis Penerimaan dan Pendapatan Usahatani Komoditas-Komoditas Yang Dibudidayakan Oleh Masyarakat Sekitar Hutan Kayu Putih Di Kabupaten Ponorogo

6.4.1. Analisis Penerimaan

Penerimaan usahatani komoditas-komoditas yang dibudidayakan adalah hasil kali dari total produksi dengan harga jual persatuan. Besarnya penerimaan usahatani dipengaruhi oleh tinggi rendahnya harga produk, dimana apabila jumlah produksi tinggi dan harga produk tinggi maka penerimaan yang diperoleh juga akan tinggi. Dan apabila jumlah produk yang dihasilkan rendah dan harga produk yang diterima juga rendah, maka penerimaan juga akan rendah. Selain itu penerimaan yang diperoleh petani tergantung dari harga jual yang telah ditentukan oleh pedagang pengumpul. Rata-rata penerimaan usahatani di daerah penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 13. Rata-Rata Produksi Komoditas-Komoditas yang Diusahakan Petani PHBM per 1 ha Dalam Satu Tahun di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.

Uraian	Musim			
	Jagung	Kedelai	Kacang hijau	Ketela
Produksi (Kw)	41,66	14	3,32	46,15
Harga (Rp/Kg)	3.000	7.000	7.000	900
Penerimaan (Rp)	12.498.462	9.800.000	2.326.154	4.153.500

Sumber : Data Primer Diolah, (2014)

Berdasarkan Tabel 13, dapat diketahui bahwa penerimaan petani yang mengikuti program PHBM di hutan kayu putih dalam satu tahun terdapat empat kali tanam, yang pertama pada awal bulan november menanam tanaman jagung bersamaan dengan tanaman ketela, awal februari menanam kedelai, dan awal mei menanam kacang hijau memiliki jumlah produksi dan harga berbeda-beda tiap Kg hasil produksi.

Penerimaan tiap-tiap komoditas yang ditanam oleh petani di kawasan hutan kayu putih tidak sama, untuk tanaman jagung di lahan kayu putih menghasilkan jumlah penerimaan tertinggi yaitu sebesar Rp. 12.498.462. Selanjutnya kacang hijau adalah komoditas dengan jumlah penerimaan sedikit

yaitu sebesar Rp. 2.326.154. Hal ini disebabkan pada waktu budidaya komoditas kacang hijau pengairan sulit didapatkan karena musim kemarau. Usahatani ketela merupakan tanaman tambahan petani dalam penerimaan, di lahan kayu putih karena tidak ada perawatan khusus dalam berbudidaya.

6.4.2. Analisis Pendapatan

Pendapatan usahatani komoditas-komoditas yang dibudidayakan petani adalah hasil bersih yang diperoleh oleh petani dengan mengurangi penerimaan dengan total biaya. Berdasarkan Tabel 14 dapat diketahui bahwa pendapatan usahatani yang mengikuti program PHBM.

Rendahnya pendapatan petani disebabkan dari rendahnya produksi dan harga komoditas-komoditas tanaman yang diusahakan oleh petani sebagai setiap kali terjadi panen di daerah penelitian selalu terjadi panen raya dan menyebabkan harga tanaman usahatani menjadi rendah. Perbedaan pendapatan yang besar adalah akibat dari perubahan iklim terutama curah hujan. Rata-rata pendapatan petani PHBM di daerah penelitian dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Rata-Rata Pendapatan Komoditas-Komoditas yang Diusahakan Petani PHBM per 1 ha Dalam Satu Tahun di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.

Uraian	Tahun			
	Jagung	Kedelai	Kacang hijau	Ketela
Penerimaan (Rp)	12.498.462	9.800.000	2.326.154	4.153.500
Total Biaya (Rp)	4.054.912	3.578.815	1.071.278	1.946.651
Pendapatan (Rp)	8.443.550	6.221.185	1.254.876	2.206.849

Sumber : Data Primer Diolah, (2014)

Berdasarkan Tabel 14 di atas, dapat diketahui bahwa pendapatan petani yang mengikuti program PHBM pada usahatani di lahan kayu putih yang memperoleh pendapatan paling tinggi yaitu pada komoditas jagung sebesar Rp. 8.443.550, besarnya tingkat pendapatan pada usahatani jagung dikarenakan tingginya hasil produksi yang dihasilkan. Sedangkan pada komoditas kacang hijau menghasilkan pendapatan paling rendah dibandingkan dengan ke tiga komoditas yang lain, rendahnya pendapatan yang diperoleh pada usahatani kacang hijau disebabkan hasil panen yang dihasilkan tidak sebesar pada komoditas

unggulan di hutan kayu putih. Besarnya rata-rata pendapatan yang diperoleh petani PHBM untuk komoditas kacang hijau yaitu hanya sebesar Rp. 1.254.876.

Analisis kelayakan usahatani komoditas-komoditas yang diusahakan oleh petani di lahan kayu putih dan di Desa Sidoharjo merupakan hal yang penting karena bisa menjelaskan kondisi usahatani tiap-tiap komoditas yang ditanam apakah layak untuk dilakukan atau tidak. Analisis kelayakan menggunakan R/C *Ratio* yaitu membandingkan antara penerimaan yang didapat dengan total biaya yang dikeluarkan. Jika nilai R/C *Ratio* lebih dari 1 maka usahatani yang dilakukan oleh petani dapat dikatakan layak secara finansial, sedangkan jika nilai R/C *Ratio* kurang dari 1 maka usahatani komoditas-komoditas masyarakat di Desa Sidoharjo dapat dikatakan tidak layak secara finansial. Berikut adalah tabel 15 rata-rata R/C *Ratio* komoditas-komoditas yang di usahakan petani non PHBM.

Tabel 15. Rata-rata R/C *Ratio* Komoditas-Komoditas yang Diusahakan Petani PHBM per 1 ha dalam Satu Tahun di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.

Uraian	Tahun			
	Jagung	Kedelai	Kacang hijau	Ketela
Penerimaan (Rp)	12.510.000	9.800.000	2.326.154	4.153.500
Total Biaya (Rp)	4.054.912	3.578.815	1.071.278	1.946.651
R/C <i>Ratio</i>	3,08	2,7	2,1	2,2

Sumber : Data Primer Diolah, (2014)

Berdasarkan Tabel 15 di atas, dapat diketahui bahwa R/C Rasio dari ke empat komoditas usahatani di lahan hutan kayu putih menunjukkan angka yang lebih dari 1, hal ini bisa diartikan bahwa ke empat komoditas yang ditanam di lahan kayu putih layak untuk dikembangkan. Nilai R/C Rasio paling tinggi yaitu pada komoditas jagung sebesar 3,08. Sedangkan nilai RC Rasio yang paling rendah yaitu pada komoditas kedelai dan ketela. Tingginya nilai R/C Rasio pada komoditas jagung disebabkan lahan hutan yang dikelola petani PHBM memiliki potensi kesuburan tanah yang baik, sehingga lahan kayu putih memiliki kecocokkan untuk usahatani jagung.

6.5. Analisis Faktor-Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Pendapatan Usahatani di Lahan Kayu Putih

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani di lahan kayu putih menggunakan beberapa macam faktor. Faktor-faktor (X) yang digunakan yaitu luas lahan garapan, umur, pendidikan, tanggungan keluarga. Faktor-faktor tersebut merupakan variabel bebas (*independent*) yang besaran jumlahnya dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan yang diinginkan. Sedangkan pendapatan usahatani (Y) merupakan variabel terikat (*dependent*) yang besaran jumlahnya dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi.

Analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan ketiga, yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usahatani di lahan kayu putih, maka dalam penelitian ini menggunakan fungsi pendapatan. Hasil analisis regresi pada fungsi pendapatan tersebut disajikan pada Tabel 17.

6.5.1. Uji Asumsi Klasik

1. Multikolinieritas

Seperti pada fungsi produksi usahatani, uji multikolinieritas dilakukan dengan dua cara yaitu dengan korelasi antar variabel independen dan menggunakan uji *Variance Inflation Factor* (VIF). Multikolinieritas bisa diketahui dengan korelasi antar variabel independen. Jika nilai korelasi lebih dari 0,8, maka terjadi korelasi yang erat antar variabel. Nilai korelasi antar variabel fungsi pendapatan bisa dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Korelasi Antar Variabel Independen Fungsi Pendapatan

	Tanggungan Keluarga	Pendidikan	Luas lahan	Umur
Tanggungan keluarga	1.000	.193	.178	.451
Pendidikan	.193	1.000	-.149	.527
LuasLahan	.178	-.149	1.000	.078
Umur	.451	.527	.078	1.000

Sumber : Data Primer Diolah, (2014)

Tabel 17. Hasil Uji Multikolinieritas Fungsi Pendapatan Usahatani Di Desa Sidoharjo.

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
LuasLahan	.922	1.084
Umur	.588	1.700
Pendidikan	.685	1.459
Tanggungans Keluarga	.776	1.289

Sumber : Data Primer Diolah, (2014)

Berdasarkan Tabel 17, hasil analisis regresi berganda pada faktor-faktor pendapatan usahatani mempunyai nilai koefisien dan VIF yang berbeda-beda. Apabila nilai VIF lebih dari 10, maka taksiran parameter kurang baik. Pada hasil regresi dengan tingkat eror 5% diketahui bahwa hasil multikolinieritas tidak ada variabel yang memiliki nilai lebih dari 10 sehingga model fungsi pendapatan usahatani komoditas-komoditas tidak terjadi multikolinieritas.

2. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan *residual* dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas bisa dideteksi dengan uji grafik. Jika pada grafik terbentuk suatu pola tertentu dan tersebar maka terjadi heteroskedastisitas. Pada hasil regresi dengan tingkat eror 5% diperoleh suatu grafik yang tidak memiliki pola. Sehingga model tidak terdeteksi adanya heteroskedastisitas.

3. Autokolerasi

Autokorelasi merupakan uji asumsi klasik yang menunjukkan adanya hubungan tingkat kesalahan dengan kesalahan sebelumnya. Untuk mendeteksi autokolerasi digunakan cara Durbin Watson (dw). Jika nilai dw lebih besar dari pada nilai du dan lebih kecil dari $4 - du$ maka tidak ada autokolerasi. Pada hasil regresi dengan tingkat eror 5% diperoleh hasil Durbin Watson 1,801. Hasil ini memenuhi uji autokolerasi karena nilai dw lebih dari nilai du yaitu 1,792 dan nilai dw lebih kecil dari $4 - du$.

4. Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati

normal. Normalitas bisa dideteksi dengan uji grafik. Jika pada data menyebar membentuk suatu pola di sekitar garis diagonal maka model memenuhi asumsi normalitas. Pada hasil regresi dengan tingkat eror 5% diperoleh hasil grafik dengan data yang membentuk suatu pola di sekitar garis diagonal sehingga model memenuhi uji normalitas.

6.5.2. Hasil Analisis Regresi

Beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap pendapatan usaha tani di hutan kayu putih pada program PHBM dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda, variabel terikat adalah pendapatan petani dalam usahatani komoditas-komoditas yang dibudidayakan. Sedangkan variabel bebas yang digunakan antara lain luas garapan, umur, pendidikan, dan tanggungan keluarga, dan hasil analisis tersebut akan ditunjukkan pada tabel 16 berikut ini:

Tabel 16. Hasil uji R^2 dan uji F Fungsi Pendapatan di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.

Model	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
				R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.884	.870	1.84211E6	.884	63.122	4	33	.000	1,801

Sumber : Data Primer Diolah, (2014)

Berdasarkan Tabel 16, diketahui bahwa nilai R^2 adalah 0,884 yang berarti bahwa 88,4% pendapatan usahatani di lahan kayu putih dipengaruhi oleh luas garapan, umur, pendidikan, dan tanggungan keluarga. Sedangkan sisanya yaitu 11,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Dari tabel 16 diperoleh bahwa nilai $F_{hitung} (63,122) > F_{tabel} (3,45)$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, berarti bahwa variabel independent (luas lahan, umur, pendidikan dan jumlah tanggungan keluarga) secara bersama-sama memberikan pengaruh secara nyata terhadap variabel dependent yaitu variabel pendapatan usahatani di hutan kayu putih.

Dari kedua uji model di atas diperoleh kesimpulan bahwa model regresi yang dipakai sudah baik. Selanjutnya pengaruh dari masing-masing variabel bebas diuji dengan uji t.

Berdasarkan Tabel 17, diketahui variabel luas garapan memiliki taraf signifikansi yang kurang dari 0,05 (5%) sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan masyarakat petani. Sedangkan variabel umur, pendidikan, dan tanggungan keluarga tidak signifikan karena nilai probabilitasnya lebih dari 0,05 (5%).

Tabel 17. Hasil Regresi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani PHBM di Hutan Kayu Putih Ponorogo.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T hitung	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8189560.62	3.074E6		1.678	0,103
LuasLahan	1843.36***	121.589	.934	15.161	0,000
Umur	-92591.22**	46856.332	-.152	-1.976	0,057
Pendidikan	-98805.16	91127.926	-.078	-1.084	0,286
Tgg.keluarga	220004.06	375163.389	.039	.586	0,562
R ²					0,884
F hitung					63,122
Ftabel					3,95
T tabel pada taraf signifikansi 0,01					2,423
T tabel pada taraf signifikansi 0,1					1,303
Keterangan:					
*** Signifikan pada taraf $\alpha = 5\%$					
** Signifikan pada taraf $\alpha = 10\%$					

Sumber : Data Primer Diolah, (2014)

Berdasarkan Tabel 17 maka model fungsi pendapatan petani bisa ditulis sebagai berikut :

$$\text{Pendapatan} = 8.189.560,62 + 1.843,35 \text{ Luas lahan} - 92.591,22 \text{ Umur} - 98.805,16 \text{ Pendidikan} + 220.004,06 \text{ Tanggungan Keluarga} + e$$

1. Luas Lahan

Berdasarkan hasil analisis regresi, pada variabel luas lahan berpengaruh nyata dengan variabel pendapatan dan nilai koefisien regresi luas lahan sebesar 1.843,35 bertanda positif, sehingga dapat diartikan bahwa apabila luas garapan petani semakin meningkat sebesar 1 m², maka pendapatan petani akan meningkat sebesar Rp. 1.843,36. Hal ini dikarenakan di kawasan hutan kayu putih tergolong dalam kategori lahan subur, jadi peningkatan luas kepemilikan lahan petani akan meningkatkan hasil pertanian, sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan petani yang mengikuti program PHBM.

2. Umur

Pada Tabel 17, dapat diketahui bahwa pada variabel umur berpengaruh nyata terhadap peningkatan pendapatan, sehingga penambahan umur setiap tahun pada usahatani di lahan kayu putih tidak meningkatkan pendapatan usahatani di daerah penelitian. Hal ini disebabkan karena petani peserta yang mengikuti program PHBM bervariasi umurnya dari 39-68 tahun, jadi rata-rata umur petani PHBM lebih mudah untuk menerima teknologi baru atau inovasi baru yang berasal dari luar.

3. Pendidikan

Pada Tabel 17, dapat diketahui bahwa pada variabel pendidikan petani tidak berpengaruh nyata terhadap peningkatan pendapatan. Hal ini dikarenakan petani atau masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi akan cenderung beralih ke sektor non pertanian sedangkan petani yang berpendidikan rendah (tidak lulus atau tamat SD) lebih cenderung untuk menekuni profesinya sebagai petani, dengan kondisi yang demikian, maka petani yang mengikuti program PHBM di lahan kayu putih kurang berkembang.

4. Tanggungan Keluarga

Berdasarkan model tersebut dapat diketahui, variabel tanggungan keluarga tidak berpengaruh nyata terhadap peningkatan pendapatan petani di daerah penelitian. Hal ini dikarenakan, setiap penambahan tanggungan keluarga yang terjadi pada petani PHBM tergolong anggota keluarga yang belum bekerja, sehingga tidak dapat memberikan bantuan dalam hal keuangan atau finansial untuk keluarganya. Penambahan keluarga yang terjadi pada petani PHBM sebesar 2 orang.

Berdasarkan hasil analisis regresi Tabel 18 di atas, dapat diketahui bahwa variabel independen pada penelitian ini (luas lahan, umur, pendidikan, dan jumlah tanggungan keluarga) hanya ada satu variabel yang berpengaruh secara nyata dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu variabel luas lahan, sedangkan variabel umur, pendidikan dan jumlah tanggungan keluarga tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. Hal ini bisa diartikan, jika petani PHBM ingin meningkatkan pendapatannya, solusi yang bisa ditawarkan berdasarkan hasil

penelitian ini yaitu dengan cara meningkatkan luas penguasaan lahan yang dikelola petani PHBM.

